



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah yang terdapat dalam dokumen ini.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MEREALISASIKAN
GERAKAN MAGRIB MENGAJI DI KECAMATAN PANGKALAN
KERINCI KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI



Oleh

**MUHAMMAD TAUFIK
NIM: 11424103941**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*Siyasah*)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU -
PEKANBARU
1441 H / 2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MEREALISASIKAN
GERAKAN MAGRIB MENGAJI DI KECAMATAN PANGKALAN
KERINCI KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



Oleh

**MUHAMMAD TAUFIK
NIM: 11424103941**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (Siyasah)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU -
PEKANBARU
1441 H / 2020 M**



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **GERAKAN MAGRIB MENGAJI PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH: STUDI DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN**, yang ditulis oleh:

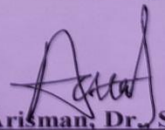
Nama : **Muhammad Taufik**

NIM : 11424103941

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, _____ 1441 H
Juni 2020 M
Pembimbing Skripsi


Arisman, Dr. S.H.I., M.Sy.
NIP. 198409292020121001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MEREALISASIKAN GERAKAN MAGRIB MENGAJI DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH* yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD TAUFIK**
NIM : 11424103941
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 09 Agustus 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua

H. Rahman Alwi M.Ag

Sekretaris

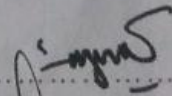
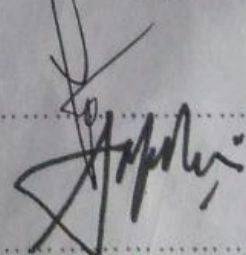

H. Marzuki M.Ag

Penguji I

Irfan Zulfikar M.Ag

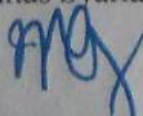
Penguji II

Dr. Aslati M.Ag


.....

.....

.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

ABSTRAK

Muhammad Taufik (2021): Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Merealisasikan Gerakan Magrib Mengaji Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyasah

Untuk menindaklanjuti program magrib mengaji yang dipelopori oleh Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten Pelalawan secara tegas menghimbau program Gerakan magrib mengaji dengan disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

Rumusan masalah adalah Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 tahun 2016 tentang Magrib mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan? Bagaimana Peranan Pemerintah, Tokoh Agama dan Masyarakat dalam menerapkan kebijakan Magrib Mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan? Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kebijakan magrib mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan). Sebagai data primer yaitu Hasil Wawancara dengan Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Alim ulama di kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan angket untuk peserta magrib mengaji.

Hasil penelitian ini Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji di kecamatan Pangkalan Kerinci berdasarkan fakta dilapangan seluruh komponen masyarakat saling membantu untuk menyukseskan gerakan magrib mengaji. Dari pelaksana dan peserta, Sumber daya dan dana, evaluasi dan sanksi serta faktor yang mempengaruhinya. Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kebijakan gerakan magrib mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yaitu: Pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi. Kedua, Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Kebijakan. Ketiga, Membuat dan Melaksanakan Peraturan Daerah Kecamatan Pangkalan Kerinci No. 4 Tahun 2016. Kemudian Peran Tokoh Agama dalam mewujudkan kebijakan magrib mengaji adalah: pertama, menjadi tenaga pengajar dalam gerakan magrib mengaji. Kedua, Mengayomi anak-anak dan remaja yang menjadi tujuan utama dari gerakan magrib mengaji. Ketiga, Mengevaluasi peserta magrib mengaji, sehingga bisa dinilai tingkat keberhasilan dalam kebijakan Perda Magrib mengaji. Peran masyarakat dalam gerakan magrib mengaji adalah memberikan partisipasi dan dorongan untuk turut melaksanakan gerak magrib mengaji setiap harinya. Berusaha meramaikan masjid, mushala dan langgar serta surau untuk magrib mengaji. Menurut perspektif *fiqh Siyasah*, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji sesuai dengan konsep siyasah. Pada konsep siyasah, dalam mengambil atau membuat kebijakan harus sesuai dengan kemaslahatan. Seperti prinsip siyasah, yaitu: "Tindakan kebijaksanaan imam (kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".

Kata Kunci: Magrib Mengaji, *Siyasah*.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Merealisasikan Gerakan Magrib Mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyash”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada:

1. Kepada orangtuaku, Bapakku Supriadi dan Almh Ibuku Sutrisni, dan Adikku Khairunnisa, yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II dan Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Wakil Rektor III yang telah memberi kesempatan dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.



4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Arisman Dr.,S.H.I M.Sy selaku pembimbing skripsi yang sangat sabar dalam membimbing saya
6. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.
8. Sahabat seperjuanganku HTN (Siyasah) 14 yang selalu memberi do'a dan semangat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi serta menjadi penyemangat terbaik bagi penulis.
9. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT.

Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Pelalawan	18
B. Demografi.....	21
C. Kehidupan Ekonomi.....	22
D. Kehidupan Keagamaan	23
E. Keadaan Geografi Kecamatan Pangkalan Kerinci	23
F. Keadaan Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci	25
G. Pendidikan Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci	25
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Al-Quran dan Magrib Mengaji.....	27
1. Keutamaan Membaca al-Qur'an	27
2. Awal Mula Istilah Magrib Mengaji.....	31
3. Upaya Melestarikan Nilai al-Quran	35
4. Konsep dan Panduan Magrib Mengaji	38
B. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 Tentang Magrib Mengaji dan Ketatanegaraan Islam	41
1. Peraturan Daerah dalam Ketatanegaraan Islam Islam	44
2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin.....	45
3. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	47
4. <i>Siyasah Idariyah</i>	52
5. <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 Tentang Magrib Mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	62
B. Peranan Pemerintah, Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Menerapkan Kebijakan Magrib Mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	69
C. Kebijakan Magrib Mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	72

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

1. Lampiran I. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 tahun 2016 tentang Magrib Mengaji
2. Lampiran II. Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan Tokoh Pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan rentang kendali yang cukup luas, agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien ada baiknya menggunakan sistem desentralisasi. Sebagai Negara kesatuan, Indonesia menggunakan sistem desentralisasi, berupa penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya.¹ Desentralisasi dibutuhkan untuk memperkuat Pemerintah Daerah untuk menyatukan antara Negara dengan masyarakat lokal, selain itu desentralisasi juga dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Negara yang memiliki kondisi geografis yang cukup luas dengan populasi yang besar dengan sistem desentralisasi otonomi daerah ini diharapkan akan lebih cepat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 18 ayat (6) UUDNRI tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Peraturan Daerah merupakan salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah.

¹ Yusnani Hasyimzoem, *dkk, Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik begitu bunyi dari Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatatur dengan undang-undang”.²

Peraturan Daerah yang di maksud pada pasal 18 ayat (6) UUDNRI tahun 1945 adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah berada di bawah UUD, TAP MPR, UU, PP dan PERPRES, oleh karena itu muatan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pada pasal 1 angka (10) menyatakan bahwa program Legislasi Daerah adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Sementara itu tujuan hukum dari dibentuknya Peraturan Daerah yang dibuat Pemerintah Daerah adalah untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah bersangkutan. Sehingga dengan demikian pada dasarnya Peraturan Daerah adalah merupakan sarana komunikasi korelasi antara Kepala

² Kitab Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu setiap keputusan yang penting dan menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah harus mengikutsertakan masyarakat.³

Kemudian di dalam *fiqih siyasah* juga telah mengkaji mengenai hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar Negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, metode dan pendekatan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.⁴

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵ Sumber hukumnya berasal dari al-Quran dan Hadist dan sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu. Objek kajian dalam *fiqih siyasah* ini adalah tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

³Telinga Semut, "maksud dan tujuan pembuatan Peraturan Daerah", <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/maksud-dan-tujuan-pembuatan-peraturan.html?m=1>, (di akses pada sabtu, 11 januari 2020)

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : prenamedia group, 2014), hlm. 17

⁵*Ibid*, hlm. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai bagian dari *fiqih*, objek kajian di dalam *fiqih siyasah* tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari *fiqih* pada umumnya, yaitu metode *ushul fiqih* dan kaidah-kaidah *fiqih*. Metode *ushul fiqih* antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *'adah*, *maslahah mursalah*, dan *istishab*. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash al-Quran dan Hadist Nabi.

Salah satu kaidah *fiqih* yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik antara lain adalah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Tindakan kebijaksanaan imam (kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”⁶

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak efektif berlaku. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, karena itu kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan tertentu atau diri sendiri.⁷

⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 61.

⁷ *Ibid*, hlm. 17-18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqih siyasah* adalah kajian *fiqih siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan bermasyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* yang merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariah.⁸

Yang berkaitan dengan pemaknaan *tasyri'* dapat dikatakan pula bahwa *tasyri'* adalah menetapkan syariat, menjelaskan hukum dan membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan. Masyarakat sebagai objek sekaligus sebagai subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Dalam *siyasah dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan Negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang di anut suatu Negara tertentu yang disebut dengan *siyasah tasri'iyah*.⁹

Dimana al-Quran merupakan pendoman hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. al-Quran di turunkan Allah swt kepada Rasulullah saw untuk memberikan petunjuk dan untuk mengatur kehidupan manusia dalam rangka mencapai hidup di dunia maupun akhirat, tujuan tersebut tidak akan tercapai seandainya al-Quran tidak dipelajari, dibaca dan diamalkan. Itulah sebabnya setiap umat Islam dituntut untuk mempelajari al-Quran.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 36

⁹ *Ibid*, 39-40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu pentingnya kegiatan membaca al-Quran bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Untuk itu perlu adanya kesadaran untuk membaca al-Quran, terutama kesadaran bagi pemuda karena sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan Negara di masa depan. Hal ini perlu diperhatikan, disebabkan karena pergaulan remaja yang saat ini begitu bebas, aktifitas keagamaan pun sedikit berkurang. Sampai saat ini, masih banyak umat Islam yang tidak bisa membaca al-Quran dengan baik, apalagi memahami isinya. Atas ketidakmampuan ini, mereka saling berdalih tidak mendapat pendidikan agama yang memadai pada waktu kecil.

Seiring perkembangan waktu keberadaan mayoritas masyarakat Indonesia yaitu beragama Islam, semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam itu sendiri, ditambah dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat yang memberi dampak negatif lebih besar dari dampak positif dari kalangan dewasa sampai anak-anak yang masih berada di dalam pengampuan orang tua. Kemudian juga bisa dibuktikan bahwa masyarakat di Kota Pangkalan Kerinci kebanyakan dari mereka setelah melakukan sholat magrib berjamaah mereka lebih banyak yang pulang ke rumah ataupun duduk-duduk di warung ketimbang melakukan pengajian meskipun adanya sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Maghrib Mengaji.¹⁰ Gerakan Magrib Mengaji atau disingkat gemar mengaji yaitu suatu gerakan untuk membudayakan kegiatan membaca al-Quran setelah shalat Maghrib di kalangan masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan yang bertujuan untuk menghidupkan

¹⁰ Observasi Penelitian, Oktober 2019



kembali budaya mengaji saat magrib yang sebenarnya sudah mengakar jauh di Indonesia.¹¹

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji, bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama dan memberantas Buta Aksara al-Quran sehingga terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah dan memiliki karakter keagamaan yang kuat.¹²

Penyelenggaraan Wajib mengaji merupakan salah satu urusan wajib di bidang penyelenggaraan pendidikan yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sehingga untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pengaturan yang jelas, kepastian hukum, serta sesuai dengan kondisi masyarakat.¹³

Namun dalam peraktek di lapangan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Magrib Mengaji, belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan di lapangan kebanyakan dari masyarakat Kota Pangkalan Kerinci yang hanya menetapkan kegiatan wajib mengaji ini, adapun di daerah pelalawan lainnya masyarakat setelah mereka mengerjakan shalat magrib berjama'ah mereka lebih

¹¹ Diakses dari <https://www.goriau.com/berita/baca/menjadi-perda-bupati-pelalawan-canangkan-gerakan-maghrib-mengaji.html>, Tanggal 15 Januari 2020, Pukul 21.45 WIB.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 4 Tahun 2016 tentang Wajib Mengaji

¹³ Diakses dari <https://www.goriau.com/berita/baca/menjadi-perda-bupati-pelalawan-canangkan-gerakan-maghrib-mengaji.html>, Tanggal 15 Januari 2020, Pukul 21.45 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak menghabiskan waktunya dengan aktifitas lainnya seperti menonton TV, bermain warnet, kumpul-kumpul di warung kopi dari pada mereka membaca al-Quran, ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap agamanya dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan aparatur desa sehingga minimnya pengetahuan masyarakat khususnya berkenaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.¹⁰

Pada Observasi penulis Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, penulis menemukan adanya gejala-gejala yang berkaitan dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji oleh aparatur Desa-desa, sebagai berikut :

1. Di lapangan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang gerakan masyarakat magrib mengaji belum sepenuhnya terealisasi oleh aparatur kota pangkalan kerinci yang sebagaimana yang diharapkan.
2. Kebanyakan dari masyarakat Kabupaten Pelalawan khususnya hanya beberapa Desa yang setelah mereka mengerjakan shalat maghrib berjama'ah mereka lebih banyak menghabiskan waktunya dengan aktifitas lainnya seperti menonton TV, main PS, game online dari pada mereka membaca al- Qur'an.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap agamanya dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan aparatur desa sehingga minimnya pengetahuan masyarakat Desa khususnya berkenaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan semakin berkembangnya kemajuan zaman, kegiatan anak-anak mulai mengalami pergeseran dari surau, mushalla, langgar dan masjid bergeser ke ruang keluarga dengan menonton acara-acara televisi atau bermain game online. Mengaji yang biasa dilakukan sehabis salat ashar maupun magrib tidak lagi menjadi kegiatan rutin yang membanggakan, melainkan seolah para remaja menjauhi rumah Allah swt tersebut.

Dari kasus ini banyak polemik yang belum terpecahkan dan perlu dipertanyakan dan dianalisis. Salah satunya adalah bagaimana regulasi dari Perda Kabupaten Pelalawan No. 4 tahun 2016 Tentang magrib mengaji? Mengapa setelah dikeluarkan kebijakan Gemar mengaji oleh Bupati Kab. Pelalawan sebagai upaya memberantas buta aksara al-Quran juga untuk menghidupkan syiar dan suasana keagamaan di Kab. Pelalawan, namun realitanya masih banyak mushala, masjid yang kosong dan sunyi dari Gemar mengaji yang ditetapkan oleh pemerintah kab. Pelalawan.

Dari pemaparan di atas, maka penulis akan menganalisis permasalahan lebih lanjut berkenaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 tahun 2016 tentang Magrib Mengaji dalam skripsi yang berjudul: **“Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Merealisasikan Gerakan Magrib Mengaji Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyasah”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam peneletian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Maghrib mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan peranan Aparatur dalam menerapkan Peraturan daerah dalam perspektif *Fiqih Siyasah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis akan merumuskan masalah hanya mencakup pada tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 tahun 2016 tentang Magrib mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana Peranan Pemerintah, Tokoh Agama dan Masyarakat dalam menerapkan kebijakan Magrib Mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
3. Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap kebijakan magrib mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 tahun 2016 tentang magrib mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui Peranan Pemerintah, Tokoh Agama dan Masyarakat dalam menerapkan kebijakan Magrib Mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- c. Untuk Mengetahui tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap kebijakan magrib mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang Gerakan Magrib Mengaji Perspektif Fiqih Siyasah: Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu.
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan.⁵ Menurut Soesono Soekanto, definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai

dengan metode cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal yang bertentangan suatu kerangka tertentu.⁶

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah golongan penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan Angket.¹⁴ Penelitian empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Maka penelitian ini bersifat kualitatif.¹⁵ Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh sehingga akan didapatkan informasi secara utuh..

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan disana terdapat Peraturan Daerah Kabupaten

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003. Hlm. 43.

¹⁵ Menurut Sutrisno Hadi, *Library Research* adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian Murni. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (PT. Raja Grafindo persada: Jakarta, 2004. Hlm. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelalawan No. 4 tahun 2016 tentang wajib mengaji namun masyarakat khususnya remaja belum menerapkannya.

3. Subjek dan Objek

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Dusun, 2 orang Ninik Mamak, 2 orang Alim Ulama, dan 2 orang Tokoh masyarakat serta remaja 12-15 tahun yang menjadi sasaran kegiatan magrib mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pelalawan.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi atau pelaksanaan gerakan Magrib mengaji dikalangan remaja awal yang berusia 12-15 tahun di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sebagai bentuk intervensi pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang menjadi penelitian yang ditentukan sebelumnya.¹² Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini adalah dari Pemerintah Desa adalah Kepala Dusun, 2 orang Ninik Mamak, 2 orang Alim Ulama, dan 2 orang Tokoh masyarakat serta remaja 12-15 tahun. Sedangkan sampel ditelaah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Data dan Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada tiga sumber, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang langsung diperoleh dari Informan yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak Pemerintah Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti teori tentang definisi desa, *fiqh siyasah*, mekanisme Penerapan Perda Maghrib Mengaji dan lain sebagainya.

c. Data tertier.

Data pendukung lainnya seperti, kamus, jurnal, undang-undang, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga cara yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung tentang proses seleksi perangkat aparatur desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- b. Wawancara yaitu dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada informan dengan membuat daftar pertanyaan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan sebagai acuan dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak Pemerintah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

- c. Kajian kepustakaan yaitu, penulis menguraikan berbagai sudut analisis berdasarkan kepustakaan yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan metode yang tepat untuk menemukan solusi terhadap rumusan masalah.
- d. Angket yaitu, Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan kumpulan-kumpulan pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.

7. Teknik Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpulkan, maka data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.¹⁶

¹⁶Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hal. 28



F. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus. Dari hasil Wawancara yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancang penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penulisan, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN, bab ini memaparkan tentang sejarah Kabupaten Pelalawan, Demografi, Kehidupan ekonomi, kehidupan keagamaan, keadaan geografi Kecamatan Pangkalan Kerinci, Keadaan Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan pendidikan penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci.

BAB III TINJAUAN TEORITIS, bab ini memaparkan dengan 2 bagian, yaitu: **Pertama**, al-Quran dan Magrib Mengaji, berisi tentang keutamaan membaca al-Quran, upaya melestarikan nilai al-Quran, awal mula istilah Magrib Mengaji, konsep dan panduan Magrib Mengaji. **Kedua**, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 Tentang Magrib Mengaji dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketatanegaraan Islam, berisi tentang Perda dalam ketatanegaraan Islam, tugas dan tanggung jawab Pemimpin, *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Idariyah* dan *Siyasah Tasyri'iyah*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, yaitu memaparkan mengenai pelaksanaan, peranan Pemerintah, Tokoh Agama serta Masyarakat, Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap kebijakan wajib Mengaji di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.¹

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.²

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainya kepulauan. Beberapa Pulau Besar yang

¹ Diakses dari <http://jdih.pelalawankab.go.id/home/page/profil-wilayah>, tanggal 23 Desember 2020, Pukul 21.35 Wib.

² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau kecil lainnya.³

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sampai akhir 2010 adalah sebanyak 311.726 jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya. Di Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi, serta 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan adalah Ibukota Kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibukota kabupaten yaitu 1 Km sedangkan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk Dalam.⁴

Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.⁵

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya

³ Ibid.,

⁴ Ibid.,

⁵ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000.⁶

Dengan terbentuknya Legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna, terpilihlah pasangan T. Azmun Jaafar, SH dengan ABD.Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No. KPTS.508/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya.⁷

Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T. Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau.⁸

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak

⁶ Diakses dari <http://jdih.pelalawankab.go.id/home/page/profil-wilayah>, tanggal 23 Desember 2020, Pukul 21.35 Wib.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah:⁹

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau

B. Demografi

Penduduk Kabupaten Pelalawan terdiri dari berbagai suku bangsa; Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Mandailing, Batak, Aceh, Nias, Tionghoa dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa mempunyai adat istiadat dan kebiasaan sendiri. Namun yang dianggap sebagai penduduk asli adalah suku Melayu, sementara suku-suku bangsa lainnya adalah pendatang.¹⁰

Suku Melayu yang ada di Kabupaten pelalawan terdiri lagi dari beberapa persukuan, seperti, Peliang, Pelabi, Melayu, dan sebagainya. Bahasa melayu yang digunakan ada sedikit perbedaan diantara masing-masing kecamatan. Misalnya untuk menyebutkan kata “nanti”, dalam bahasa Melayu Bunut disebut dengan

⁹ Diakses dari <http://jdih.pelalawankab.go.id/home/page/profil-wilayah>, tanggal 23 Desember 2020, Pukul 21.35 Wib.

¹⁰ Diakses dari <http://jdih.pelalawankab.go.id/home/page/profil-wilayah>, tanggal 23 Desember 2020, Pukul 21.35 Wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah “*Kaang*” sedangkan dalam bahasa Melayu Pangkalan Lesung disebut dengan istilah “*Kian*”. Meskipun terdiri dari suku bangsa yang berbeda-beda, masyarakat Kabupaten Pelalawan hidup damai berdampingan.

C. Kehidupan Ekonomi

Penduduk Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan kondisi geografisnya yang terdiri dari daratan, pesisir sungai dan pesisir lautan, selalu menyesuaikan sistem usaha dan ekonominya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian besar penduduk bermatapencaharian sebagai petani karet dan kelapa sawit.¹¹

Sektor pertanian tanaman pangan, palawija, dan sayur-sayuran menjadi satu komoditas yang potensial di Kabupaten Pelalawan. Komoditas padi berada di Kecamatan Pangkalan Kuras, tepatnya di Desa Betung dan disepanjang aliran sungai Kampar serta di Pulau Mendhol (Kuala Kampar).

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu penghasil Kelapa Sawit di Provinsi Riau disamping komoditas perkebunan lainnya seperti karet. Total produksi Kelapa Sawit tahun 2015 sebesar 0.45 juta ton.

UIN SUSKA RIAU

¹¹ Diakses dari <http://jdih.pelalawankab.go.id/home/page/profil-wilayah>, tanggal 23 Desember 2020, Pukul 21.35 Wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu semua, Presentase kemiskinan di Kabupaten Pelalawan tahun 2015 sebesar 12,30% dari total penduduk. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar 11,15%.¹²

D. Kehidupan Keagamaan

Masyarakat Kabupaten Pelalawan adalah masyarakat majemuk, baik dari segi etnis, adat istiadat, tradisi maupun agama dan kepercayaan. Etnis Melayu dan Islam merupakan kelompok mayoritas. Penduduk Kabupaten Pelalawan yang non-Muslim tidak ada yang berasal dari etnis Melayu. Mereka berasal dari etnis lain seperti Batak, Cina, Jawa dan sebagainya. Agama Budha dan Khong Hucu dianut etnis Cina. Sedangkan agama Kristen diperkirakan baru masuk ke Pelalawan sekitar setengah abad yang lalu, dibawa pendatang dari Jawa, Sumatera Utara dan dari daerah lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2014 diketahui bahwa di Kabupaten Pelalawan terdapat 398 mesjid, 688 mushollah, 109 gereja dan 1 rumah ibdah lainnya.¹³

E. Kondisi Geografi Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan hasil pemekaran dari Kecamatan Langgam terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 dan pada awal pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Pangkalan

¹² Diakses dari <http://jdih.pelalawankab.go.id/home/page/profil-wilayah>, tanggal 23 Desember 2020, Pukul 21.35 Wib.

¹³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerinci, Desa Sekijang, Desa Rantau Baru, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, dan Desa Bukit Agung kemudian pada Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 Desa Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kelurahan: Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, seiring dengan perkembangannya maka pada Tahun 2005 Desa Sekijang dimekarkan menjadi Kecamatan yang merupakan pecahan dari Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Pangkalan Kerinci sampai saat sekarang wilayahnya terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 4 (empat) Desa.¹⁴

Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 3 kelurahan dan 4 desa yaitu, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, Desa Rantau Baru dan Desa Mekar Jaya yang terletak ± 55 Km dari pusat Ibu kota Propinsi dan terletak di jalur Lintas Timur Sumatra.¹⁵

Luas Wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci $\pm 616,40$ Km², yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kecamatan Kerinci Kanan Kab. Siak
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Sebelah Barat : Kecamatan Bandar Sekijang
4. Sebelah Timur : Kecamatan Pelalawan

¹⁴ Profil Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 2020.

¹⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 3 kelurahan dan 4 desa yaitu, Kelurahan Pangkalan Keirinci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, Desa Rantau Baru dan Desa Mekar Jaya.¹⁶

F. Keadaan Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci

Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara langsung mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena semakin meningkat populasi penduduk suatu daerah akan diikuti dengan pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut.

Jumlah penduduk di Kecamatan Pangkalan Kerinci berjumlah ± 101.115 Jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 50.143 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 50.975 jiwa, dalam jumlah KK 42.318.¹⁷

G. Pendidikan Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci

Pendidikan merupakan sesuatu hal yang penting untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk itu penduduk perlu mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga menghasilkan kualitas sumberdaya manusia yang handal yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan pembangunan, khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Profil Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketersediaan pengelola dan sarana pendidikan yang memadai merupakan faktor penunjang dalam peningkatan pendidikan penduduk. Dengan tersedianya kedua faktor tersebut, diharapkan program pemerintah tentang wajib belajar dapat direalisasikan dengan baik.

Bila dilihat dari sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, jumlah Taman Kanak-kanak tercatat 33 unit, SD Negri 12 unit, SD Swasta Umum 5 unit, SD Swasta Islam 4 unit, SLB 1 unit, SLTP Negri 2 unit, SLTP Swasta 4 unit, SLTP Islam 3 unit, SMU Negri 3 unit, SMU Swasta 1 unit, SMU Swasta Islam 1 unit, SMK Negri 1 unit, dan SMK Swasta 1 unit.

Jika dilihat dari banyaknya jumlah sekolah yang ada, diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Al-Quran dan Magrib Mengaji

1. Keutamaan Membaca Al-Quran

Menurut Kementerian Agama RI Gerakan Masyarakat Mengaji adalah sebuah program untuk membudayakan membaca al-Quran setelah selesai Shalat Magrib dikalangan masyarakat. Sementara menurut W.J.S Purwadarima yang dimaksud membaca adalah melihat tulisan dan mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis itu. Mengaji selalu di identikkan dengan membaca al-Quran. Mungkin ini yang menjadi salah satu faktor penyebab kenapa orang-orang tidak mau karena tidak bisa dan malu. Padahal mengaji al-Quran adalah sesuatu yang sangat menyenangkan.¹

Selain membaca, mengaji itu juga berarti memaknai dan mengartikan pengertiannya. Mengapa harus dimaknai? Karena al-Quran itu bahasa arab, yang tentunya kita sebagai orng indonesia sulit untuk tau artinya. Mengapa harus di artikan pengertiannya? Karena al-Quran berisi syair-syair Allah yang sangat indah, yang tentunya beberapa memiliki pengertian yang tersirat yang perlu di pahami. Mengaji sendiri sebenarnya bukan sebuah alternatif. Tapi mengaji adalah sebuah kewajiban. Dimana tanpa mengaji maka semua amalan yang kita lakukan tentunya hanya bohong belaka. Tidak akan di terima oleh

¹ Delfi Indra. *Pelaksanaan Manajemen Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Provinsi Sumatera Barat (Study Komparatif Di Tiga Daerah)*. Jurnal al-Fikrah, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Allah swt. Firman Allah swt dalam al-Quran Surat Fathir: 29-30 dan Al An-Kabut: 45:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ ۖ لِيُؤْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٤٥﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,” agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri”.²

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya:

“dan Sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata [1152] bagi orang-orang yang berakal”.³

Adapun di antara keutamaan membaca Al Qur'an dari sunnah Rasulullah saw adalah:⁴

a. Menjadi manusia yang terbaik:

Dari Utsman bin 'Affan rad, dari Nabi saw, beliau bersabda:

² Dapertemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Syaamil Quran. (QS: Faathir [35]: 29-30)

³ Dapertemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Syaamil Quran. (QS: Al-'Ankabut [29]: 35).

⁴ Delfi Indra. *Ibid*.

State Islamic University of Sultan Syarif Kamal Riau

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya:

“Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al Qur’an dan mengajarkannya”. (HR. Al-Bukhari)⁵

b. Kenikmatan yang tiada bandingnya

Dari Abdullah bin Umar RA, dari Nabi, beliau bersabda:

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ
وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ

Artinya:

“Tidak boleh ghibthah (menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain) kecuali dalam dua hal: (pertama) orang yang diberikan Allah swt keahlian tentang al-Qur`an, maka dia melaksanakannya (membaca dan mengamalkannya) malam dan siang hari. Dan seorang yang diberi oleh Allah swt kekayaan harta, maka ia infakkan sepanjang hari dan malam”. (Muttafaqun alaih)⁶

c. Al Qur’an memberi syafaat di hari kiamat

Dari Abu Umamah al-Bahili RA, ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

Artinya:

“Bacalah al-Qur`an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahlinya (yaitu orang yang

⁵ Ibid.,

⁶ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membacanya, mempelajari dan mengamalkannya)”. (HR. Muslim)⁷

d. Pahala berlipat ganda

Dari Ibnu Mas'ud rad, ia berkata, 'Rasulullah saw bersabda:

Artinya:

“Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al Qur'an maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan sepuluh kali lipat. Saya tidak mengatakan 'alif laam miim' satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, laam satu huruf dan miim satu huruf”. (HR. At-Tirmidzi)⁸

e. Dikumpulkan bersama para malaikat

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, Nabi Muhammad saw bersabda:

Artinya:

“Orang yang membaca Al Qur'an dan ia mahir dalam membacanya maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al Qur'an dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala”. (Mutafaqun 'alaih).⁹

Inilah sebagian dari anjuran dan keutamaan membaca Al-Qur'an, dan yang perlu diingat bahwa pahala membaca al-Quran diperoleh bagi siapa pun yang membacanya, walau tidak memahami makna dan tafsirnya. Kendati demikian kalau bisa memahaminya pahalanya tentu lebih baik dan lebih banyak

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pahalanya. Sebagian ulama menyebutkan beberapa hikmah keistimewaan membaca al-Quran yang pahalanya bisa diperoleh kendati tidak memahaminya.

Sebagian ulama menyebutkan beberapa hikmah keistimewaan membaca al-Quran yang pahalanya bisa diperoleh kendati tidak memahaminya, diantaranya adalah:¹⁰

- a. Sebagai faktor penting untuk menjaga keutuhan dan keaslian al-Quran dari perubahan dan campur tangan manusia, seperti yang menimpa kitab-kitab sebelumnya.
- b. Membentuk persatuan kaum muslimin secara bahasa, memperkuat persatuan agama, dan memudahkan sarana komunikasi di antara mereka serta memperkokoh barisan mereka.
- c. Sebagai langkah pertama bagi pembaca al-Quran untuk tadabbur, memahami dan mengamalkan al-Quran.

2. Awal Mula Istilah Magrib Mengaji

Al-Quran adalah kalamullah firman Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Ia adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sumber petunjuk dalam beragama dan pembimbing dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Betapa sempurnanya al-Quran dengan hukum-hukum dan ajaran-ajaran Allah swt yang tetap aktual dan akurat. Ia berbicara tentang berbagai sisi dan sudut kehidupan, baik tentang akidah, ibadah, etika

¹⁰ Muhammad Iqbal A. Gazali. *Keutamaan Membaca dan Menghafal Al-Qur'an. Islam* (House. 2014).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergaulan sesama manusia dan alam sekitarnya, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan al-Quran, menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berpikir dan bertindak.

Membaca al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya, kemudian diteruskan dengan tadabbur yaitu dengan merenungkan dan memahami maknanya sesuai petunjuk salafus shalih, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dilanjutkan dengan mengajarkannya.¹¹

Dengan mengaji banyak sekali manfaat luar biasa yang tidak kita sadari yaitu dari segi afektif. Mengaji secara tidak langsung mampu mempengaruhi sifat kita menjadi lebih peka terhadap sifat ketuhanan, mereka sadar akan keberadaan Allah swt, segi kognitif dengan menghafal surat pendek atau membaca susunan ayat al-Quran dengan susunan tertentu atau menerjemahkan akan memperkuat struktur otak kita, kemampuan mengingat dan menggunakan daya nalar.

Dulu kenyataan yang kita alami anak-anak tingkat sekolah dasar lebih mudah diajak mengaji ke masjid atau mushalla, bahkan tanpa ada suruhan dari orang tua karena biasanya mereka lebih cenderung akan mengikuti kemana orang tuanya pergi, jika orang tuanya pergi ke masjid atau mushalla maka tanpa diajakpun mereka akan ikut ke masjid atau mushalla, bahkan parahnya

¹¹ Muhammad Ali, *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
jika orang tuanya menonton televisi pada waktu magrib, mereka kemungkinan besar akan menonton televisi pada saat itu juga.

Dalam beberapa tahun terakhir, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Drs.H.Suryadharma Ali, begitu bersemangat meminta kepada seluruh jajarannya baik level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun tingkat desa /jorong agar melaksanakan Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di seluruh Indonesia. Program ini disampaikan melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam saat itu Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA agar umat dibentengi untuk memelihara keluhuran budaya bangsa.¹²

Secara resmi program ini dicanangkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada Tanggal 30 Maret 2011 di Jakarta. Program tersebut muncul bukan dari ruang kosong, tetapi merupakan sebuah gagasan cemerlang sekaligus bentuk nyata dari upaya Menteri Agama untuk menangkal kecenderungan masyarakat (umat Islam) yang semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai agama.

Oleh karena itu, Program Gerakan Nasional Masyarakat Magrib Mengaji yang dipelopori oleh Menteri Agama Republik Indonesia menemukan signifikasinya. Program ini merupakan sebuah terobosan di tengah kuatnya

¹² Delfi Indra. *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arus modernisasi yang menawarkan keindahan duniawi. Harapan masyarakat dari pelaksanaan program ini, setidaknya bermanfaat untuk:¹³

- a. Melestarikan tradisi “mengaji”, bertadarrus, serta mengkaji al-Quran dan ilmu agama selepas Shalat Magrib dalam rangka meningkatkan kualitas keshalehan individual dan sosial yang ditandai dengan meningkatnya kualitas ketaatan beragama melalui pembiasaan belajar agama.
- b. Membentuk sikap dan perilaku moral masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam yang diukur dari integritas, kejujuran, disiplin dan loyalitas dalam menjalankan ajaran agamanya untuk membendung dampak negatif dari modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
- c. Membangun rekayasa sosial (*social engineering*) yang didasarkan pada semangat kearifan local dan nilai-nilai spiritual sebagai pondasi bagi terciptanya karakter bangsa yang berkeadaban menuju masyarakat madani.
- d. Melahirkan generasi yang kuat, beriman dan bertakwa yang memiliki prinsip dan keteguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern baik dalam tataran individu, keluarga, masyarakat, maupun bangsa.

¹³ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II, Riau

- e. Menjadikan Program Gerakan Magrib Mengaji sebagai media untuk membangun ikatan yang kuat dalam rangka membentuk keluarga.

3. Upaya Melestarikan Al-Quran

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarrah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
 وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
 مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya:

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”¹⁴

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa pada bulan Ramadhan diturunkan al-quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan

¹⁴ Dapertemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Syaamil Quran. (QS. Al-Baqarrah [2]: 185)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang bathil. Peristiwa turunnya al-Quran disebut dengan *Nuzulul Quran*.

Sehingga untuk melestarikan al-Quran ada upaya-upaya yang dilakukan, diantaranya adalah:¹⁵

- a. **Mengimani.** Kita harus mengimani semua bagian al-Quran tanpa terkecuali. Jangan sampai kita hanya mengimani sebagian isi al-Quran, yang sesuai dengan selera dan kehendak kita saja, dan mengingkari sebagian yang lainnya, jika tidak sesuai dengan selera dan kehendak kita.
- b. **Membaca (*tilawah*).** Pada bulan Ramadhan biasanya dengan *tadarusan*. Agar dapat membaca dengan baik dan benar, maka harus mempelajari ilmu tajwid.

“Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (al Quran) maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipatgandakan dengan sepuluh (pahala). Aku tidak mengatakan ”Alif Laam Mim adalah satu huruf akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf” (HR. Tirmidzi).

“Dan bagi orang-orang yang bisa membaca al-Quran dengan baik, kelak di Hari Qiyamat akan diberi kehormatan untuk membacakan al-Quran dihadapan para penduduk Surga” (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai)
- c. **Menghafal (*al-hifzu*)** sesuai kemampuan. Tujuannya agar mempermudah dalam pengamalannya, seperti pada bacaan Shalat, maupun disampaikan pada waktu ceramah. Kemampuan manusia

¹⁵ Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/13/08/01/mqnttg-merawat-alquran>, 14 Februari 2021, pukul 21.45 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menghafal al-Quran, merupakan salah satu cara dari menjaga keutuhan al-Quran itu sendiri. Bahkan orang buta (tuna netra) juga diberi kemampuan untuk menghafal al-Quran. Sebab, jika terdapat bacaan (*lafadz*) atau tulisan (*kitab*) yang salah, maka para penghafal al-Quran akan mengingatkan kesalahannya. Sehingga menjadi benar kembali. *“Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang didalam hatinya tidak ada sesuatupun dari Al-Qur’an ibarat rumah yang rusak”*. (HR At-Tirmidzi)

- d. **Memahami (*al-fahmu*)**. Setiap muslim wajib memahami isi yang terkandung dalam al-Quran. Tanpa pemahaman yang baik dan benar, maka akan menjadi sulit untuk mengamalkan. Sebelum kita mengamalkan sesuatu, kita harus memahami dulu sesuatu itu, supaya tidak salah dalam mengerjakannya. Sebagai pedoman hidup yang paling lengkap, jika kita memahaminya, maka akan mempermudah kita dalam mengamalkan isinya. Karena al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, maka cara ideal untuk memahami al-Quran adalah dengan mempelajari bahasa Arab.
- e. **Diamalkan (*al-a’mal*)**. Seorang yang memahami dan mengerti sebuah kebaikan namun tidak mengamalkan bagaikan lebah yang tidak menghasilkan madu. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia yang wajib untuk diamalkan isinya, baik dalam kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Tujuannya agar manusia dapat menjalani hidup ini dengan baik sesuai petunjuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah swt. Sehingga setiap langkahnya akan dibimbing dan mendapatkan ridho dari Allah swt.

- f. **Disampaikan (*ad-dakwah*)**. Kebaikan bukanlah hanya untuk diri sendiri saja. Alangkah baiknya apabila dapat dirasakan oleh orang lain. Kebaikan yang terus menyebar ini akan menjadi ladang amal yang terus mengalir bahkan apabila kita sudah meninggal sekalipun, laksana air zamzam yang tak pernah berhenti memancar.

Upaya-upaya lain yang bisa dikembangkan dalam memelihara kemurnian al-Quran adalah dengan memperbanyak madrasah-madrasah atau lembaga pendidikan penghafal Alquran. Hadirnya lembaga-lembaga ini akan memberikan angin segar bagi umat Islam agar al-Quran dapat terpelihara hingga akhir zaman.

4. Konsep dan Panduan Magrib Mengaji

Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji mengacu kepada landasan yuridis sebagaimana berikut ini:¹⁶

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- h. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf al-Quran Bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
- i. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Huruf al-Quran.
- j. Pencanangan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji oleh Menteri Agama RI, Suryadarma Ali, tanggal 30 Maret 2011 di Jakarta.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

Dalam pelaksanaan magrib mengaji pemerintah memberikan materi utama dalam kegiatan magrib mengaji meliputi:¹⁷

- a. Membaca al-Quran;
- b. Menulis huruf al-Quran
- c. Membaca terjemahan al-Quran; dan
- d. Menghafal al-Quran.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kegiatan Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji ini dilakukan setelah selesai Shalat Magrib dan program ini sudah dimulai sejak Tahun 2016 sampai sekarang.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 Tentang Magrib Mengaji dan Ketatanegaraan Islam

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan pemeluk Islam di Kabupaten Pelalawan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan membaca dan memahami isi kandungan al-Quran melalui kegiatan yang lebih terarah dan didukung kebijakan yang jelas dan tegas.¹⁸

Kemudian menimbang bahwa ciri masyarakat Pelalawan yang religius perlu terus dipelihara dan dikembangkan dalam rangka terwujudnya Kabupaten Pelalawan maju dan sejahtera, melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang didukung oleh Pertanian yang unggul dan industri yang tangguh dalam masyarakat yang beradab, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu tahun 2030. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Kabupaten Pelalawan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan tentang Magrib Mengaji dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.¹⁹

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 dijelaskan pada pasal 1 bahwa magrib mengaji adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mempelajari, membaca dan memahami kitab suci al-Quran. Untuk

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensukseskan kegiatan magrib mengaji ini, Pemerintah Daerah membentuk tim motivator kegiatan magrib mengaji yang ditetapkan oleh Bupati.

Tugas tim motivator adalah melakukan pemantauan,²⁰ evaluasi, dan memberikan motivasi agar kegiatan magrib mengaji dapat berjalan secara efektif ditengah-tengah masyarakat.

Kegiatan Magrib mengaji dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 tahun 2016 mengatur bahwa peserta Magrib Mengaji pada dasarnya diprioritaskan untuk anak-anak usia sekolah dan anggota masyarakat yang beragama Islam yang belum bisa membaca al-Quran atau yang ingin meningkatkan kemampuan membaca al-Quran. (Lampiran 1).

Pada pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan no. 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Tenaga pengajar yang bertugas mengajar baca tulis al-Quran pada kegiatan Magrib Mengaji terdiri dari:²¹

- a. penyuluh Agama Islam PNS dan non PNS;
- b. pengurus Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau;
- c. ustadz atau Ustadzah yang mempunyai keahlian dalam ilmu al-Quran.

Tenaga pengajar pada kegiatan Magrib Mengaji mempunyai tugas dan kewajiban diantaranya adalah sebagai berikut:²²

²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

²² Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. mengajar masyarakat yang beragama Islam dalam membaca al-Quran dalam rangka semangat memberantas buta aksara al-Quran di Kabupaten Pelalawan;
- b. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya;
- c. meningkatkan kemampuan professional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan kegiatan Magrib Mengaji;
- d. menjaga marwah sesuai dengan amanah yang telah diberikan masyarakat.

Setiap masyarakat yang beragama Islam mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran membaca al-Quran. Dan setiap orang tua, ninik mamak, alim ulama, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat wajib berpartisipasi untuk mendukung terlaksananya kegiatan magrib mengaji. Serta Kepala Desa/Lurah dan Camat bertanggung jawab untuk menyukseskan kegiatan magrib mengaji yang dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing.

1. Peraturan Daerah dalam Ketatanegaraan Islam

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan peraturan daerah dalam ketaatan Islam perlu dipahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan peraturan daerah. Pengertian Peraturan Daerah secara yuridis yang tertuang dalam ketentuan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Nomor 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dari pengertian peraturan daerah di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah dalam ketaatan Islam menurut A.M. Fatwa, istilah Perda dalam ketaatan Islam (Syari'ah) sebenarnya tidak dikenal di dalam hukum positif di Indonesia. Seperti halnya dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah. Begitupula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak mengenal adanya istilah Perda syariah, melainkan hanya Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Jadi, Perda dalam ketaatan Islam (syari'ah) yang dimaksud adalah Perda biasa yang materi muatannya mengandung unsur-unsur maupun nilai-nilai agama tertentu. Hal ini harus dibedakan, karena dapat membingungkan hingga muncul pemahaman seolah-olah perda tersebut adalah syariat Islam. Dengan demikian istilah perda syariah tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan khalifah atau pemerintahan dalam pandangan para juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan, keagamaan dan untuk memelihara agama. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Kekuasaan politik harus dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan syari'at Islam, menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persamaan umat lewat kerjasama dan tolong menolong, serta menciptakan keamanan dan ketenangan.

Menurut Al-Baqillani sebagaimana disitir Ann K. S. Lambton, tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk (1) Menegakkan hukum yang telah ditetapkan, (2) membela umat dari gangguan musuh, (3) melenyapkan penindasan, (4) menghilangkan keresahan masyarakat, (5) pemeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjanjian haji dengan baik, dan melaksanakan syari'at yang dibebankan kepadanya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syari'at. Al-Baghdadi berpendapat, pemerintahan bertujuan melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga perkawinan. Pemerintahan itu, kata Rabi', melalui penguasanya bertugas untuk memelihara dan melaksanakan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Al-Mawardi²³ lembaga imamah mempunyai tugas dan tujuan umum. Pertama, mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijmak oleh salaf (generasi pertama umat Islam). Kedua, melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya. Ketiga, melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta. Keempat, memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. Kelima, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. Keenam, jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam. Ketujuh, memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nas-nas dan ijthiad. Kedelapan, mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif. Kesembilan, meminta nasehat dan pandangan dan orang-orang terpercaya. Kesepuluh, dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia

²³ Al-Mawardi memiliki nama lengkap Abu Hasan Ali ibn Habib al-Mawardi, dilahirkan (364-450 H/974-1058 M) di Basrah, Irak. Lihat Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan urusan agama. Lembaga pemerintahan juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.²⁴

Sejalan dengan persyaratan kepala pemerintahan, tugas dan tujuan utama pemerintahan dalam pandangan Ibn Taimiyah untuk melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat. Paradigma pemikirannya ini banyak disandarkan kepada ayat-ayat al-Quran dan hadits. Tidak berbeda dari pendahulunya, Ibn Kaldun menyatakan sesungguhnya kehidupan di dunia ini bukanlah tujuan akhir dari keberadaan manusia. Kehidupan manusia di dunia ini adalah satu marhalah yang dijalani menuju kehidupan lain, yaitu kehidupan akhirat. Undang-undang Islam yang bersifat politik menaruh perhatian terhadap kehidupan dunia, maka imamah, warisan yang ditinggalkan oleh Nabi adalah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

3. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara

²⁴ Al-Ghazali adalah pemikir Muslim yang paling populer dan berpengaruh di dunia Islam. Memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, dilahirkan di Ghazaleh tahun 1059 M/501 H. Lihat Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁵

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁶

Abu A'la al-Maududi mendefenisikan *dustur* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.²⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.²⁸

²⁵ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenamedia Group. 2014.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

²⁹ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁰

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan;
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- d. Persoalan *bai'at*;
- e. Persoalan *waliul ahdi*;
- f. Persoalan perwakilan;
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

³⁰ Dzajuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana. 2009. hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.³¹ Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai''ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadha''iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan

³¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

4. *Siyasah Idariyah*

Dalam Islam Nabi Muhammad saw merupakan otoritas pemegang kekuasaan pertama dimana nabi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meneladani sifat Nabi Muhammad saw adalah salah satu cara untuk berakhlak kepadanya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari iman akan adanya Nabi Muhammad saw sebagai Rasul. Beriman kepada Rasul adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah swt memilih diantara manusia agar dijadikan Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu Nya kepada seluruh umat manusia. Mengetahui dan meneladani sifat Rasul tidak hanya cukup dengan kata namun harus dengan disertai amalan. Salah satu hal yang harus kita teladani dari sifat Rasul adalah mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad saw yaitu empat sifat nabi sidiq, amanah, tabligh, fathonah.

Meneladani keempat sifat Nabi Muhammad merupakan hal yang wajib kita jalankan sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Ahzab ayat 21:

Isi kandungan ayat diatas merupakan perintah bagi umat muslim untuk meneladani sifat Rasul. Sebagai seorang pemimpin agama dan Negara, Nabi Muhammad saw memegang dua amanat. Yang pertama nabi sebagai Rasul Allah, kedua nabi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Setelah Nabi Isi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandungan ayat diatas merupakan perintah bagi umat muslim untuk meneladani sifat Rasul.

Sebagai seorang pemimpin agama dan Negara, Nabi Muhammad saw memegang dua amanat. Yang pertama nabi sebagai Rasul Allah, kedua nabi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Setelah Nabi Muhammad saw wafat muncul berbagai polemik baik dari segi agama maupun dari segi pemerintahan.

Dalam masalah agama Banyak orang yang murtad serta tidak mau membayar zakat. Sebelum Nabi dimakamkan terlebih dahulu disenggarakan pemilihan khalifah baru untuk menggantikan Nabi Muhammad saw sebagai seorang pemimpin. diangkatnya Abu Bakar merupakan awal masa kehalifan Islam. Masa khalifahan Islam berlangsung hingga empat generasi mulai dari Abu Bakar hingga sayyidina Ali. Semua pemimpin pada masanya mempunyai karakteristik memimpin yang berbeda-beda. kepemimpinan bisa di sebut khalifah, imamamah, dan ulil amri. Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara.

Dimana administrasi negara (*siyasah idariyah*) pada masanya di konstruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Kata *idariyah* berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara* asy-syay'ayudiru idariyah. Yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian *idariyah* secara istilah, terdapat banyak pakar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mendefinisikan. *Siyasah idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-Ahkam al-idariyyah*).

Kata *idariyah* di dalam al-Quran tidak ada satupun ayat yang dapat kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*. Didalam al-Mu'jam al-Mufahras, di bawah kata “dawr” telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari fi’il tsulasi “dara” begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata al-Idarah tidak dijumpai dalam satu hadispun dari sekian banyak hadis Rasulullah saw hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata “dawr” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata “idarah” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru di gunakan di era modern. Pada dasarnya *Siyasah idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *diwan* sendiri di bagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tantara;
- b. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- d. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Dalam *fiqh siyasah* sumber-sumber *Siyasah idariyah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendekiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederahnaan dan kemudahan menangani masalah-masalah adminisistrasif. Dalam *Siyasah idariyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas di perintahkan oleh syara.

Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *Siyasah idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentiatngan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kabaikan/kesempurnanan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu “sederhana dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan” yang penulis jabarkan seperti di bawah ini:

- a. Sederhana dalam peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

- b. Cepat dalam pelayanan

Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting. Pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari diri kita dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Menurut Islam memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberi kebaikan kepada diri kita sendiri.

- c. Profesional dalam pelayanan

Profesional merupakan sifat dari suatu profesi artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga bisa diartikan sebagai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

5. *Siyasah Tasyri'iyah*

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-suthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam.

Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislaif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu al-Quran dan sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.³²

³² Muhammad Iqbal. *Ibid.*, hlm. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nashsh al-Quran dan sunnah, Undang-Undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah Undang-Undang Ilahiyah yang diisyariatkan-Nya dalam al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi saw dalam hadis. *Kedua*, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi).

Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nashsh. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa Undang-Undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Badan legislatif berwenang meninjau kembali dan mengganti Undang-Undang lama dengan Undang-Undang baru jika terjadi perubahan dalam masyarakat yang tidak bisa lagi mematuhi Undang-Undang lama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam lembaga legislatif para anggotanya akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menentukan Undang-Undang baru yang lebih efektif dan relevan. Undang-Undang baru tersebut berlaku apabila telah didaftarkan pada sekretariat negara dan disebarluaskan dalam masyarakat.

Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam jangka waktu tertentu, lembaga legislatif akan meminta pertanggungjawaban dan laporan keuangan negara. lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.³³

Bentuk dan perkembangan *al-sulthah al-tasyri'iyah* berbeda dan berubah dalam sejarah, sesuai dengan perbedaan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad saw, otoritas yang membuat *tasyri'* (hukum) adalah Allah swt. Allah menurunkan ayat-ayat al-Quran secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Disamping itu, Nabi saw juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Quran yang masih bersifat global dan umum.

³³ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kerajaan Mughal (India) legislasi hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Aurangzeb (Alamgir I) yang memerintah pada 1658-1707 M. dialah yang memprakarsai pennghimpunan fatwa ulama dan mengamodifikasinya. Ia membentuk sebuah komisi yang bertugas menyusun kitab kumpulan hukum Islam. Hasil kerja komisi ini adalah diundangkannya kitab peraturan ibadah dan muamalah umat Islam yang bernama Fatwa-I Alamghiriyah yang dinisbahkan kepada nama sultan tersebut. Kitab ini terdiri dari enam jilid tebal dengan rujukan utama pada mazhab Hanafi, mazhab yang paling banyak dianut umat Muslim India.

Namun sifat Undang-Undang ini setengah resmi, karena tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk diamalkan sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Legislasi besar-besaran dilakukan pada masa pemerintahan Usmani (1300-1924). Pada masa ini, hukum yang dipakai dalam masyarakat bukan hanya fiqh, melainkan juga keputusan khalifah atau sultan terhadap sengketa atau perselisihan yang terjadi diantara anggota masyarakat.³⁴

Selain itu, ada juga keputusan yang diambil dalam rapat majelis legislatif sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah* dan disetujui oleh khalifah. Bentuk pertama disebut *Idarah Saniyah*, sedangkan yang kedua dinamakan dengan *Qanun*. Puncak kemajuan kanun ini terjadi pada masa Khalifah Sulaiman I (1520-1566 M). Karena besarnya perhatian khalifah ini terhadap perundang-undangan, maka ia digelar dengan Sulaiman al-Qanuni. Ditangan Sulaiman al-Qanuni juga kerajaan Usmani mengalami puncak kejayaan di berbagai bidang.

³⁴ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun setelah Sulaiman al-Qanuni wafat, kerajaan Usmani mulai mengalami kemunduran.³⁵

Tidak ada lagi khalifah yang memiliki kapasitas untuk menjalani dua kekuasaan tersebut. Kemampuan politik penguasa-penguasa penggantinya tidak diikuti dengan kemampuan dan penguasaan mereka di bidang keagamaan. Oleh karena itu, dalam tugas-tugas kenegaraan mereka dibantu oleh *Sadrazam (shadr al-a'zham)* untuk urusan politik dan *Syaikh al-Islam* untuk urusan-urusan keagamaan.³⁶

Pada mulanya *syaikh al-Islam* berasal dari mufti (pemberi fatwa). Mereka bertugas memberi jawaban terhadap pertanyaan tentang permasalahan agama. Diantara mufti ini kemudian ada yang diangkat sebagai penjabat negara untuk menjawab permasalahan agama yang dihadapi negara. jadilah mufti sebagai jabatan resmi dalam negara dengan nama *syaikh al-Islam* yang fatwa-fatwanya menjadi rujukan dan pegangan negara. Bahkan dalam wewenang legislasi hukum Islam, *Syaikh al-Islam* menjadi tempat bergantung khalifah Usmani dan merangkap sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah*. Namun demikian, kekuasaan khalifah-khalifah Usmani tetap bersifat absolut, dan tidak jarang pula sifat absolut ini di dukung oleh *Syaikh al-Islam*.³⁷

Pada perkembangan selanjutnya, daulat Usmani semakin lemah. Banyak daerah yang berada dibawah kekuasaan Khalifah Usmani melepaskan diri dan kembali ke tangan bangsa-bangsa Eropa, karena kerajaan Usmani sering mengalami kekalahan dari bangsa-bangsa Eropa.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*, hlm. 198.

³⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji di kecamatan Pangkalan Kerinci berdasarkan fakta dilapangan seluruh komponen masyarakat saling membantu untuk menyukseskan gerakan magrib mengaji, dari tokoh masyarakat, alim ulama termasuk kedalamnya pengurus mesjid, mushalla dan pengurus tempat-tempat pelaksanaan magrib mengaji turut serta melaksanakan magrib mengaji. Dan pelaksanaan ini juga disiapkan alokasi dana untuk membantu kegiatan magrib mengaji, setiap tenaga ajar mendapatkan bantuan Rp. 350.000,-/bulan. Dan para peserta magrib mengaji sangat antusias mengikuti kegiatan magrib mengaji karena sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
2. Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kebijakan gerakan magrib mengaji di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yaitu: Pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi. Kedua, Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Kebijakan Gerakan Magrib Mengaji. Ketiga, Membuat dan Melaksanakan Peraturan Daerah Kecamatan Pangkalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerinci No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib mengaji. Kemudian Peran Tokoh Agama dalam mewujudkan kebijakan magrib mengaji adalah: pertama, menjadi tenaga pengajar dalam gerakan magrib mengaji. Kedua, Mengayomi anak-anak dan remaja yang menjadi tujuan utama dari gerakan magrib mengaji. Ketiga, Mengevaluasi peserta magrib mengaji, sehingga bisa dinilai tingkat keberhasilan dalam kebijakan Perda Magrib mengaji. Peran masyarakat dalam gerakan magrib mengaji adalah memberikan partisipasi dan dorongan untuk turut melaksanakan gerakan magrib mengaji setiap harinya. Berusaha meramaikan masjid, mushala dan langgar serta surau untuk magrib mengaji. Sehingga Perda Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang magrib mengaji dapat terealisasi sesuai dengan pedomannya.

3. Melihat dari perspektif *fiqh Siyasa*, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji sesuai dengan konsep *siyasa*. Pada konsep *siyasa*, dalam mengambil atau membuat kebijakan harus sesuai dengan kemaslahatan. Seperti prinsip *siyasa*, yaitu: “*Tindakan kebijaksanaan imam (kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan*”. Kemaslahatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 tahun 2016 tentang Magrib Mengaji ini adalah: Pertama, Menimbang dari Keutamaan membaca al-Quran; kedua, Upaya melestarikan tradisi baik yang sudah ada dilingkungan Masyarakat; ketiga, Upaya untuk tetap menjaga nilai-nilai al-Quran, yaitu: mengimani, membaca (*tilawah*), menghafal (*al-hifzu*), memahami (*al-*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

fahmu), diamalkan (*al-a'mal*) dan disampaikan (*ad-dakwah*); keempat, merupakan salah satu tugas pemimpin yaitu, kekuasaan politik harus dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan syari'at Islam, menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persamaan umat lewat kerjasama dan tolong menolong, serta menciptakan keamanan dan ketenangan.

B. Saran

Meskipun peneliti menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu peneliti perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat peneliti harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan saran kepada Pemerintah Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk lebih memperketat atau memperkuat pengawasan terhadap Perda Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji dan alokasi dana harus tepat.

Saran peneliti untuk masyarakat agar kiranya bisa lebih memahami lagi dan lebih patuh terhadap Perda Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

Adapun saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah agar bisa mengevaluasi masalah alokasi dana untuk kegiatan Gerakan Magrib Mengaji.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Referensi

- Abu Samah. *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Derah*. Cet. Ke-1. Pekanbaru: Suska Press. 2018.
- Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia. 2005.
- Abdurrahman Taj. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif. 1993.
- Abdul Wahab Khallaf. *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah. 1350 H.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Dapertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Syaamil Quran. 2007.
- Dzajuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana. 2009.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Meteorologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara : Yogyakarta. 2006
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby.
- Jimmy Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2016.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya :Bandung. 2002.
- Mahmud Al-Dausary. *Keutamaan Al-Qur'an*. Jakarta: Akulah.Net. 2015.
- Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenamedia Group. 2014.
- Muhammad Iqbal A. Gazali. *Keutamaan Membaca dan Menghafal Al-Qur'an*. Islam House. 2014.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2012.

Sutrisno Hadi. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo persada. 2004.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Syaikani dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Cet Ke-9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

UIN SUSKA RIAU. *Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum. 2014.

Yusnani Hasyimzoem, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok : Rajawali Pers. 2018.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji

Data Sekunder

Fadji Wahyu. *Pengembangan Masyarakat Islam: Program Magrib Mengaji Kecamatan Koto Tangah Padang, Sumatera Barat*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jurnal Al-Faud. 2018.

Gansas Sugestian, dkk. *Pembinaan Keagamaan Masyarakat Kota Bandung Melalui Program Magrib Mengaji (Studi Kasus Pada Mesjid Al-Fitrhoh Kecamatan Bandung Kulon)*. Universitas Pendidikan Indonesia. Tarbawy. 2017.

Deffi Indra. *Pelaksanaan Manajemen Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Provinsi Sumatera Barat (Study Komparatif Di Tiga Daerah)*. Jurnal al-Fikrah, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2014

Profil Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 2020.

Lain-lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

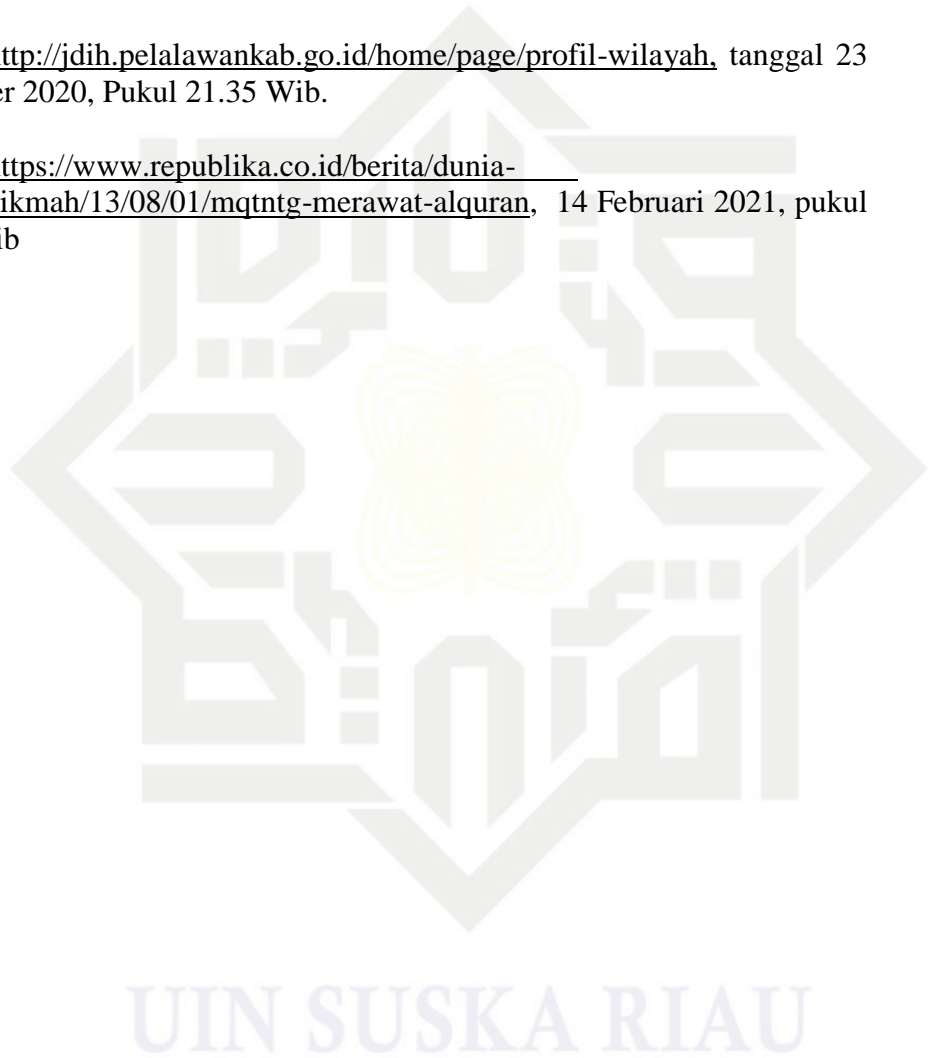
Diakses dari Telinga Semut, “maksud dan tujuan pembuatan Peraturan Daerah”, <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/maksud-dan-tujuan-pembuatan-peraturan.html?m=1>, Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 21.20 WIB.

Diakses dari <https://www.goriau.com/berita/baca/menjadi-perda-bupati-pelalawan-canangkan-gerakan-maghrib-mengaji.html>, Tanggal 15 Januari 2020, Pukul 21.45 WIB.

Diakses dari <http://jdih.pelalawankab.go.id/home/page/profil-wilayah>, tanggal 23 Desember 2020, Pukul 21.35 Wib.

Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/13/08/01/mqtnhg-merawat-alquran>, 14 Februari 2021, pukul 21.45 Wib

LAMPIRAN





Hasil Wawancara 1

Informan dari Alim Ulama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Nama : Khairul Umam

Jabatan : Alim Ulama

Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pada pukul 18.30 Wib saya mengunjungi salah satu masjid di Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan, setelah shalat magrib berjama'ah dan kemudian saya bertemu dengan Ustadz Khairul Umam selaku alim ulama disana serta meminta waktu beliau untuk mau diwawancarai seputar PERDA No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

Saya : Assalamualaikum Ustad, Perkenalkan Nama saya Taufik Hidayat, Mahasiswa di UIN SUSKA RIAU, Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Ustadz. Maaf ustadz, boleh saya minta waktunya sebentar untuk bertanya tentang Gerakan Magrib mengaji ustadz?

Alim Ulama : Waalaikumsalam taufik, boleh taufik. Silahkan. Apa yang bisa ustadz bantu?

Saya : Apakah di masjid ini ada Gerakan magrib mengaji Ustadz?

Alim Ulama : Alhamdulillah ada taufik, kebetulan habis magrib ini slalu ada anak-anak yang selesai shalat magrib terus belajar membaca alqur'an. Taufik bisa lihat. Disana ada anak-anak yang sedang berkumpul sembari menunggu ustad yang akan mengajar mengaji taufik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya

: yaa ustadz, jadi adik-adik disana lagi menunggu untuk belajar mengaji yaa ustadz. Biasanya selalu ramai atau bagaimana ustadz?

Alim Ulama

: ya taufik, selalu rutin ada yang belajar mengaji disini

Saya

: Dari pemerintah Kabupaten Pelalawan ada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji, apakah Ustadz tau tentang Perda ini?

Alim Ulama

: Perda? Tidak pernah saya dengar taufik. Tapi memang kebiasaan di masjid sini selalu ada anak anak yang belajar mengaji taufik, ditambah disekolah biasa kan tidak terlalu banyak jam belajar mengaji taufik. Jadi anak-anak disini banyak yang belajar mengaji di masjid taufik.

Saya

: Alhamdulillah yaa Ustadz. Berarti masjid disini sudah terbiasa melakukan Gerakan Magrib Mengaji yaa ustadz.

Alim Ulama

: iyaa taufik, sudah jadi kebiasaan.

Saya

: baiklah ustadz, terimakasih atas waktunya ustadz. Maaf mengganggu waktu mengajar mengajinya ustad.

Alim Ulama

: samasama taufik, semoga sukses kedepannya.

Saya

: Terimakasih Ustadz. Assalamualaikum wr. wb...

Alim Ulama

: Waalaikumsalam wr. wb...

Hasil Wawancara 2

Informan dari Tokoh Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Nama : Jumri Harmadi

Nama : Ardison

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pada pukul 08.30 Wib saya mengunjungi Kantor Camat untuk mencari tokoh Masyarakat yang bisa saya wawancarai seputar Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji. Kemudian saya bertemu dengan Bapak Jumri Harmadi dan Bapak Ardison, kemudian saya mewawancarai mereka.

Saya : Assalamualaikum Pak, Perkenalkan Nama saya Taufik Hidayat, Mahasiswa di UIN SUSKA RIAU, Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Pak. Maaf pak, boleh saya minta waktunya sebentar untuk bertanya tentang Gerakan Magrib mengaji pak?

Tokoh Masyarakat : Waalaikumsalam taufik, boleh taufik. Silahkan. Apa yang bisa bapak bantu?

Saya : Apakah bapak mengetahui tentang adanya PERDA Kabupaten Pelalawan No. 4 tahun 2016 tentang Magrib Mengaji pak?

Tokoh Masyarakat : Perda Gerakan Magrib Mengaji ya? Bapak tau taufik. PERDA ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami tentang pokok-pokok ajaran agama dan memberantas buta Aksara Al-Qur'an sehingga terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah dan memiliki karakter keagamaan yang kuat.

Saya

: Bagus tujuan dari Perda ini yaa pak. Kegiatan Magrib Mengaji ini dihimbau untuk dilaksanakan dimana saja pak? Apakah hanya dilaksanakan di mesjid saja atau bagaimana pak?

Tokoh Masyarakat

: Kegiatan ini ni taufik bisa dilaksanakan di Mesjid, Mushalla, Langgar dan surau taufik. Didalam perda dijelaskan detailnya taufik.

Saya

: baik pak, bagaimana tingkat minat masyarakat dalam menjalankan Perda Magrib Mengaji ini pak?

Tokoh Masyarakat

: Tingkat minat masyarakat kecamatan pangkalan kerinci dengan program ini sangat tinggi juga taufik. Soalnya kenapa demikian? Karena banyak anak anak yang memang setiap shalat magrib beramai-ramai ke masjid maupun mushala yang ada ustad/pengajar ngajinya untuk datang belajar mengaji taufik.

Saya

: tenaga pengajar disini apakah hanya ustadz seperti biasa atau bagaimana pak?

Tokoh Masyarakat

: Kalau berdasarkan Perda Magrib Mengaji, tenaga pengajar itu tidak hanya ustadz atau ustazah saja. Namun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga ada Penyuluh agama Islam PNS dan Non PNS, kemudian Pengurus Mesjid, Mushallah, Langgar dan surau taufik.

Saya : baiklah Pak, terimakasih atas waktunya pak.

Tokoh Masyarakat : samasama taufik, semoga sukses kedepannya.

Saya : Terimakasih Ustadz. Assalamualaikum wr. wb...

Tokoh Masyarakat : Waalaikumsalam wr. wb...

Saya : baiklah ustadz, terimakasih atas waktunya ustadz. Maaf mengganggu waktu mengajar mengajinya ustad.

Alim Ulama : samasama taufik, semoga sukses kedepannya.

Saya : Terimakasih Ustadz. Assalamualaikum wr. wb...

Alim Ulama : Waalaikumsalam wr. wb...

Hasil Wawancara 3

Informan dari Pemerintah Daerah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Nama : H. Muhammad Harris

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Pada hari Jum'at tanggal 24 September 2020 pada pukul 14.30 Wib saya mengunjungi Kantor Bupati untuk menemui Bapak Harris selaku bupati kab. Pelalawan untuk mewawancarai seputar Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

Saya : Assalamualaikum Pak, Perkenalkan Nama saya Taufik Hidayat, Mahasiswa di UIN SUSKA RIAU, Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Pak. Maaf pak, boleh saya minta waktunya sebentar untuk bertanya tentang Gerakan Magrib mengaji pak?

Bapak Harris : Waalaikumsalam taufik, boleh taufik. Silahkan. Apa yang bisa bapak bantu?

Saya : Terima Kasih sebelumnya pak, saya meneliti tentang Perda Kab. Pelalawan No. 4 tahun 2016 Tentang Gerakan Mengaji pak. Pada pasal 19 dikatakan bahwa Biaya pelaksanaan kegiatan Magrib Mengaji dibebankan kepada pelaksana kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Apakah benar seperti itu dalam realitanya pak?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Harris

: Benar sekali taufik, untuk gerakan mengaji ini sudah ada anggaran yang disiapkan. Setiap tenaga pengajar diberikan bantuan Rp. 350.000,-/bulannya. Dan ini sudah terealisasi sejak Perda Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2016 disahkan.

Saya

: Apakah bantuan untuk Tenaga Pengajar ini diberikan secara menyeluruh pak?

Bapak Harris

: Tentu Taufik, Bantuan ini diberikan secara Menyeluruh kepada tenaga pengajar yang ada di Mesjid, Mushalla dan tempat-tempat pelaksanaan Magrib Mengaji di Kabupaten Pelalawan.

Saya

: Baik pak, kemudian apakah ada tolak ukur atau evaluasi dari kegiatan magrib mengaji ini pak?

Bapak Harris

: Tentu ada taufik, di dalam Perda No. 4 Tahun 2016 sudah diatur tentang evaluasi dari kegiatan gerakan mengaji serta sanksi apa saja yang akan didapatkan jika tidak turut serta dalam menyukkseskan kegiatan magrib mengaji di lingkungan Kabupaten Pelalawan.

Saya

: baik pak, terimakasih atas informasi dan waktunya pak.

Bapak Harris

: sama sama taufik, sukses untuk penelitiannya.

Lampiran Foto Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

